

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP UNIVERSITAS TERBUKA

Effendi Wahyono

Pengantar

Kelahiran pendidikan jarak jauh didorong oleh adanya kesenjangan antara tingginya kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan keterbatasan sarana/prasarana pendidikan. Kesenjangan itu dalam berbagai hal diatasi dengan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh.

Belajar dengan sistem jarak jauh sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1950-an dengan diselenggarakannya sekolah penyiaran (*schoolbroadcasting*) yang diprakarsai oleh Djawatan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (kini Departemen Pendidikan Nasional). Kemudian di Bandung diselenggarakan penataran guru secara tertulis. Di samping lembaga pemerintah, pada periode itu terdapat sebuah lembaga swasta di Semarang yang menyelenggarakan kursus tata buku secara tertulis dengan sistem jarak jauh.

Pada tahun 1970-an, kebutuhan akan tenaga kependidikan sangat tinggi seiring dengan perluasan kesempatan belajar. Pendidikan tenaga kependidikan (guru) diselenggarakan dengan program-program *instant* (program cepat) untuk dapat memenuhi kebutuhan guru baik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama (SLP) maupun sekolah menengah atas (SLA). Guru SLP diangkat dari lulusan D-I atau PGSLP, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan guru SLA diangkat dari mereka yang telah memiliki ijazah D-III atau PGSLA. Akibat dari kebijakan itu, terjadi penurunan mutu guru yang jika tidak diatasi, akan mengakibatkan penurunan mutu pendidikan. Karena itu, perlu diadakan peningkatan mutu guru dengan mengirimkan mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi dalam kenyataannya, mereka tidak dapat meninggalkan pekerjaannya sebagai guru yang jumlahnya waktu itu masih sangat kecil. Tidak ada guru pengganti jika mereka dikirim untuk mengikuti pendidikan. Cara yang paling efisien yang memungkinkan mereka dapat mengikuti pendidikan dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai guru adalah dengan pendidikan jarak jauh.

Pada tahun 1981 Pemerintah menyelenggarakan proyek pendidikan tenaga kependidikan dengan sistem jarak jauh. Semula proyek ini ditangani oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi karena hal ini menyangkut tingkat pendidikan tinggi, proyek itu kemudian dialihkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan proyek ini diserahkan kepada 12 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di seluruh Indonesia.

Masalah lain yang muncul sebagai dampak perluasan kesempatan pendidikan adalah ledakan lulusan sekolah menengah yang terjadi pada Pelita IV, yang tidak sebanding dengan daya tampung pendidikan tinggi. Ketika itu lulusan sekolah menengah atas telah mencapai 600.000 siswa. Jumlah itu diperkirakan akan meningkat menjadi 1,5 juta, sedangkan daya tampung perguruan tinggi yang

ada waktu itu, baik negeri maupun swasta hanya mencapai kurang lebih 650.000. Itu berarti ada lebih dari 750.000 lulusan sekolah lanjutan atas yang tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi. Pemerintah tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk membuka perguruan tinggi tatap muka (konvensional) guna menampung lulusan sekolah menengah atas, sedangkan pemerataan belajar menjadi salah satu unsur dalam Delapan Jalur Pemerataan Pembangunan, program Pembangunan Lima Tahun (Pelita) IV.

Untuk mengatasi kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang ada, pemerintah memutuskan untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi negeri dengan sistem jarak jauh. Perguruan tinggi jarak jauh, dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya, memungkinkan pemerintah untuk memberikan kesempatan yang luas kepada warga negara Indonesia guna mengikuti pendidikan tinggi.

Demikianlah tujuan utama pendirian UT adalah untuk menampung lulusan sekolah lanjutan tingkat atas yang ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat pendidikan tinggi, baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan mutu dan kemampuan guru sekolah menengah tingkat pertama dan atas melalui pendidikan Diploma dan S-1 kependidikan, serta meningkatkan kemampuan mengajar para pengajar (dosen) di perguruan tinggi melalui Akta Mengajar V.

Masalah Pendidikan

UT didirikan karena adanya masalah dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia yang harus dipecahkan. Masalah utama yang dihadapi dunia pendidikan tinggi yang melatarbelakangi kelahiran UT adalah

masalah 1) daya tampung, 2) mutu, 3) relevansi, dan 4) produktivitas pendidikan tinggi.

1) *Daya Tampung*

Setiap tahun jumlah lulusan SLTA yang ingin memasuki pendidikan tinggi atau ingin menjadi mahasiswa meningkat lebih besar dari peningkatan kapasitas penerimaan mahasiswa baru, baik pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Pada akhir Pelita IV jumlah mahasiswa yang harus ditampung pada perguruan tinggi akan mencapai 1,5 juta; sementara daya tampung perguruan tinggi hanya kurang lebih 700.000 orang. Dengan demikian, akan banyak calon mahasiswa yang tidak dapat memasuki dunia pendidikan tinggi.

2) *Mutu Pendidikan*

Sumber daya utama penyelenggaraan pendidikan adalah tenaga pengajar atau dosen. Jumlah staf pengajar di seluruh perguruan tinggi negeri pada waktu itu (awal 1980-an) hanya kurang lebih 20.000 orang. Dari jumlah itu hanya 4.000 tenaga pengajar yang berstatus tenaga pengajar mandiri yaitu lektor ke atas. Jumlah staf pengajar tersebut menghadapi mahasiswa yang jumlahnya mencapai 300.000 orang. Di samping itu, dari sisi sebaran, baik secara regional maupun bidang ilmu keadaannya lebih memprihatinkan. Dari 4.000 orang yang berstatus tenaga pengajar yang berfungsi secara mandiri, 80 persen berada di 9 universitas/institut yang umumnya berada di Jawa.

3) *Relevansi*

Perencanaan pendidikan waktu itu belum pernah didasarkan atas kebutuhan pasar kerja. Perencanaan lebih banyak didasarkan atas tersedianya sumber daya (meskipun secara kualitas belum memadai), terutama tuntutan sosial seperti penampungan lulusan sekolah menengah. Akibat keadaan ini adalah ketidakmerataan dalam penyediaan lulusan perguruan tinggi untuk lingkungan kerja.

4) *Produktivitas Pendidikan*

Minimnya anggaran pembangunan untuk sektor pendidikan menyebabkan lembaga pendidikan selalu mengalami masalah kekurangan dana. Kekurangan dana pembangunan dan operasional menyulitkan pengembangan perguruan tinggi. Masalah itu diperumit lagi oleh kekurangan jumlah staf pengajar dan kekurangan dalam pengalaman dan pengetahuan staf pengajar. Kondisi yang serba kurang itu sangat berpengaruh terhadap produktivitas perguruan tinggi. Produktivitas perguruan tinggi, baik dalam bidang menghasilkan lulusan, informasi ilmiah, maupun informasi pembangunan sebagai produk tridharma perguruan tinggi waktu itu masih sangat lemah.

Kondisi pendidikan tinggi seperti itulah yang melatarbelakangi lahirnya UT, sehingga kelahiran UT diharapkan dapat ikut membantu memecahkan masalah tersebut. Meskipun demikian, kehadiran UT pada tahun 1984 menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat pendidikan yang sudah muncul sejak ide mendirikan sebuah pendidikan tinggi terbuka digulirkan. Tak heran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sendiri sempat ragu untuk meneruskan perencanaan penyiapan pendirian UT. Ada sebagian

masyarakat yang menyambut optimis atas kehadiran UT. Ada pula kalangan yang pesimis terhadap UT. Mereka yang optimis berharap dengan kehadiran UT, kesempatan warga masyarakat yang ingin memasuki perguruan tinggi menjadi tidak terbatas. Pendidikan tinggi tidak eksklusif hanya dapat dimiliki oleh masyarakat kalangan tertentu. Sebaliknya bagi mereka yang pesimis menganggap bahwa pendidikan tinggi tidak dapat dilakukan secara massal. Bagi mereka, pendidikan yang dilakukan secara massal tidak akan dapat menjaga standar kualitas.

Masalahnya kemudian adalah bagaimana mendirikan universitas yang sifatnya massal dengan sistem terbuka dengan tidak mengabaikan masalah kualitas. Pendidikan yang sifatnya massal seperti UT dapat pula dijamin kualitasnya jika penulis bahan ajar dan penulis soal ujiannya dilakukan oleh dosen-dosen terbaik yang hanya dimiliki oleh beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia. Bahan ajar tersebut kemudian dicetak (dilengkapi dengan penjelasan menggunakan audio/video) dan dikirim kepada mahasiswa yang tersebar di berbagai wilayah. Dengan cara seperti ini, sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh UT justru dapat menjembatani kesenjangan mutu pendidikan yang ada.

Mendirikan sebuah perguruan tinggi jarak jauh tidak memerlukan sumber daya akademik yang lengkap. Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan perguruan tinggi jarak jauh adalah kemampuan manajemen untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya akademik yang ada, yang telah dimiliki oleh perguruan tinggi atau lembaga yang sudah ada. Waktu itu banyak tenaga ahli yang dimiliki oleh berbagai perguruan tinggi dan lembaga lain yang belum dimanfaatkan secara optimal. Tenaga ahli itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh UT untuk menulis bahan ajar dan soal-soal ujian.

Sejak awal UT dirancang untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga lain, terutama dalam pemanfaatan sumber akademik seperti ahli dalam bidang ilmu (untuk menulis bahan ajar, tutor), ahli instruksional (untuk merancang desain instruksional), ahli media (untuk merancang jenis media yang digunakan), dan ahli bahasa, tempat dan peralatan praktek, dan perpustakaan. Karena itu kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga lain merupakan syarat mutlak dalam penyelenggaraan UT. Sebaliknya bagi perguruan tinggi lain, kehadiran UT merupakan suatu keuntungan. Banyak tenaga dosen yang mendapatkan kesempatan menulis bahan ajar untuk pendidikan tinggi yang waktu itu, bahkan sampai saat ini masih tergolong langka. Dengan kehadiran UT, perguruan tinggi di daerah dapat menggunakan bahan ajar UT yang ditulis oleh para ahli yang ada di Indonesia. Sisi lain dari kehadiran UT adalah ketersediaan bahan ajar yang dapat dipergunakan sebagai bahan perkuliahan bagi dosen dan mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Dari kenyataan itu, kehadiran UT bukan merupakan saingan bagi perguruan tinggi yang ada tetapi sebagai pelengkap.

Fenomena Pendidikan

Kelahiran UT mendapatkan sambutan yang besar dari masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari besarnya peminat UT ketika pertama kali UT menerima pendaftaran mahasiswa pada pertengahan tahun 1984. Terdapat sekitar 270.000 calon mahasiswa yang menyampaikan keinginannya untuk menjadi mahasiswa UT. Dari jumlah itu 200.000 adalah mereka yang baru lulus dari SLTA. Bagi mereka, UT menjadi pilihan ketiga, jika mereka tidak diterima pada pilihan pertama dan kedua. Tetapi karena kemampuan sumber daya yang dimiliki UT, pada tahun pertama UT hanya dapat menerima sekitar 54.000 mahasiswa.

Kehadiran UT mengubah peta pengelolaan perguruan tinggi. Pada tahun-tahun awal kelahiran UT, banyak perguruan tinggi swasta kecil yang mendaftarkan mahasiswanya menjadi mahasiswa UT. Bahan ajar UT digunakan sebagai bahan perkuliahan mereka. Sebagai mahasiswa UT, mereka juga mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh UT. Perguruan tinggi itu praktis hanya berfungsi sebagai lembaga penyelenggara tutorial bagi mahasiswa UT. Bahkan sampai saat ini, terdapat lembaga pendidikan yang menawarkan program S-1 meskipun lembaga itu tidak memiliki izin operasional. Seluruh mahasiswanya didaftarkan menjadi mahasiswa UT, mengikuti ujian UT, dan mendapatkan ijazah dari UT. Pilihan ini diambil dengan beberapa pertimbangan, antara lain UT adalah perguruan tinggi negeri. Sebagai perguruan tinggi negeri, mahasiswa yang didaftarkan menjadi mahasiswa UT tidak lagi harus mengikuti ujian negara, yang waktu itu menjadi momok bagi sebagian perguruan tinggi swasta, terutama perguruan tinggi swasta yang baru berdiri.

Pada awal perkembangannya, UT hanya menangani sistem registrasi, penyediaan bahan ajar dan ujian, sedangkan tutorial hanya dapat dilaksanakan di tempat-tempat tertentu. Hal itu telah mendorong munculnya bimbingan-bimbingan belajar. Lembaga bimbingan belajar mahasiswa UT itu sama sekali tidak berafiliasi dengan UT. Mereka adalah anggota masyarakat yang memanfaatkan kebijakan UT.

Dengan diinspirasi oleh UT yang menyelenggarakan tutorial dan ujian setiap hari Sabtu dan Minggu, pada tahun 1990-an banyak perguruan tinggi tatap muka yang membuka kelas eksekutif yang menyelenggarakan perkuliahan pada setiap hari Sabtu dan Minggu. Kelas ini dibuka untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat yang ingin melanjutkan studinya, tetapi mereka tidak dapat mengikuti perkuliahan pada hari kerja. Meskipun demikian,

mereka tidak mungkin memiliki fleksibilitas dan aksesibilitas yang tinggi, seperti halnya sistem belajar yang diselenggarakan UT.

Tahun 1999 Pemerintah mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 60 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah No. 61 tentang perguruan tinggi berbadan hukum. Terdapat pihak yang beranggapan bahwa Peraturan Pemerintah itu dikeluarkan karena pemerintah tidak memiliki dana untuk membiayai perguruan tinggi sebagai dampak dari krisis moneter yang terjadi sejak tahun 1997. Namun pihak lain menganggap bahwa Peraturan Pemerintah itu dikeluarkan untuk memberikan otonomi yang lebih besar pada perguruan tinggi dalam mengelola manajemen keuangannya. Terdapat empat perguruan tinggi yang pertama kali dialihkan fungsinya dari perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Perubahan status ini semula diperkirakan akan mengubah peta persaingan dalam hal perekrutan mahasiswa baru. Seperti halnya perguruan tinggi swasta, mahasiswa menjadi andalan dalam pencarian sumber dana pendidikan. Dengan demikian, masalah keterbatasan daya tampung bukan lagi menjadi isu sentral pembangunan pendidikan tinggi.

Pada tahun 1999, masalah lain yang muncul sebagai isu besar dalam dunia pendidikan selain dikeluarkan dua Peraturan Pemerintah tentang pendidikan tinggi tersebut di atas, juga dikeluarkan keputusan tentang Badan Akreditasi Nasional (BAN). Badan ini dibuat oleh Departemen Pendidikan untuk memberikan penilaian terhadap mutu pendidikan yang diberikan oleh setiap perguruan tinggi. Sebagaimana diketahui, UT adalah satu-satunya lembaga penyelenggara pendidikan tinggi dengan sistem jarak jauh. Dengan demikian, dibuatlah acuan yang dapat dijadikan standar untuk menilai UT.

Landasan Hukum Pendidikan Tinggi Jarak Jauh

Meskipun pada awalnya banyak kalangan yang tidak menyetujui kelahiran UT, tetapi setelah beberapa tahun kemudian, banyak perguruan tinggi yang ingin membuka perkuliahan secara jarak jauh, di samping tatap muka yang telah diberikan. Keinginan perguruan tinggi tatap muka membuka pendidikan jarak jauh mendorong Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan yang berisi rambu-rambu penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. Pada tahun 1991, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan No. 0564/u/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh. Dalam pasal 4 ayat 1 keputusan itu, dijelaskan bahwa pendidikan tinggi jarak jauh diselenggarakan oleh UT dan perguruan tinggi lain yang diberi tugas untuk melaksanakannya melalui program studi pendidikan jarak jauh. Ayat 2 keputusan itu menyebutkan bahwa penugasan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh menteri atas usul Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Pada pasal 8 Keputusan itu disebutkan bahwa syarat dan tata cara pendirian Universitas Terbuka diatur oleh menteri.

Dengan berlakunya Keputusan Menteri itu, pendidikan tinggi jarak jauh tidak lagi menjadi monopoli UT. Pendidikan tinggi lain mendapatkan peluang untuk membuka atau menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh, dengan syarat mendapat persetujuan atau penugasan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (kini Pendidikan Nasional). Peluang perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan jarak jauh juga secara tidak langsung sudah diwadahi dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999.

Aturan rinci dari pemerintah yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 107 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Program

Pendidikan Tinggi Jarak Jauh. Keputusan Menteri ini mengatur tata cara dan persyaratan penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Syarat-syarat penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 keputusan itu tidaklah mudah dipenuhi. Disebutkan bahwa program pendidikan tinggi jarak jauh diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memang memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain: *pertama*, punya sumber daya untuk merancang, menyusun, memproduksi, dan menyebarluaskan seluruh bahan ajar yang diperlukan untuk memenuhi kurikulum program. Syarat *kedua*, bekerja sama dengan perguruan tinggi lain yang sudah mempunyai izin penyelenggaraan program studi yang sama untuk memfasilitasi kegiatan pengembangan program dan bahan ajar, pemberian layanan bantuan belajar, layanan perpustakaan, pelaksanaan praktikum dan pementapan pengalaman lapangan, serta penyelenggaraan evaluasi hasil belajar secara jarak jauh; *ketiga*, mempunyai sumber daya untuk memutakhirkan secara berkala setiap bahan ajar yang diproduksi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; *keempat*, mempunyai sumber daya untuk menyediakan fasilitas praktikum dan/atau akses bagi mahasiswa untuk melaksanakan praktikum; *kelima*, sudah mempunyai izin penyelenggaraan program studi secara tatap muka dalam bidang studi yang sama, yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Pendidikan Tinggi dengan nilai A atau U (unggulan). Penyelenggara juga diwajibkan membuat laporan pelaksanaan dan menyampaikan laporan kepada Menteri Pendidikan Nasional secara berkala setiap tahun.

Dalam pasal 3 Keputusan Menteri No. 107 tersebut juga dipaparkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh dilaksanakan dengan mengutamakan: (a) penggunaan berbagai media komunikasi

yang berbentuk media komunikasi tercetak dikombinasikan dengan media lain; (b) penggunaan metode pembelajaran interaktif yang didasarkan pada konsep belajar mandiri dengan dukungan bantuan belajar dan fasilitas pembelajaran. Bahan ajar dikembangkan dan dikemas dalam bentuk tercetak dikombinasikan dengan media yang yang dapat digunakan mahasiswa untuk proses belajar mandiri (*Kompas*, 25 September 2001). Keberadaan pendidikan jarak jauh semakin jelas dalam dunia pendidikan di Indonesia dengan keluarnya Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Jaringan Kemitraan Pendidikan Tinggi Jarak Jauh

Hal yang perlu digarisbawahi dari Keputusan itu adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh harus dilaksanakan melalui suatu jaringan kerja sama dengan perguruan tinggi lain. Kerja sama itu diperlukan dalam kaitannya dengan penyediaan penulis bahan ajar, penulis soal, distribusi bahan ajar, penyediaan tutor dan ruang tutorial, penyelenggaraan praktikum, pemanfaatan perpustakaan, dan penyelenggaraan ujian. Dari bentuk kerja sama tersebut, penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh sebenarnya merupakan penyelenggaraan jaringan mata rantai pendidikan antarperguruan tinggi.

Bentuk kerja sama tersebut telah lama dijalankan UT. Ketika pertama kali didirikan pada tahun 1984 kekuatan UT adalah adanya jaringan kerja sama dengan hampir seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dari 44 perguruan tinggi negeri yang ada waktu itu, hanya satu yang tidak mau bekerja sama dengan UT. Melalui kerja sama itu, UT dapat merekrut penulis bahan ajar dari para ahli yang berasal dari berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Melalui

kerja sama tersebut, UT juga dapat memperoleh sumber daya untuk penyelenggaraan tutorial dan ujian di daerah-daerah. Di samping itu, untuk pendistribusian bahan ajar, dan komunikasi surat-menyurat, UT juga bekerja sama dengan Kantor Pos dan Giro (PT Pos Indonesia); sedangkan untuk kelancaran komunikasi, UT melakukan kerja sama pula dengan PT Telkom.

Dengan memperhatikan infrastruktur jaringan yang dimiliki UT tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Satrio Soemantri Brodjonegoro, sebagaimana dikutip *Kompas* 25 September 2001 mengatakan bahwa dari segi infrastruktur, apa yang dimiliki UT sudah cukup baik, hanya perlu beberapa perbaikan. Namun dari segi kualitas perlu ditingkatkan, sehingga bobotnya diakui oleh negara-negara lain. Dari segi program di masa depan, diharapkan UT tidak hanya melayani warga negara Indonesia, tetapi juga harus dapat diakses oleh masyarakat dunia. "Agar program pendidikan yang dilakukan UT dapat diakses masyarakat luar negeri, minimal oleh negara-negara ASEAN, materi pembelajaran yang ada harus diperbarui. Pembaruan itu baik secara materi pelajaran atau kurikulum maupun mutunya," demikian pendapat Satrio (*Kompas*, 25 September 2001).

Babak Kompetisi

Berlakunya keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang pendidikan tinggi jarak jauh merupakan salah satu perwujudan peningkatan sumber daya manusia yang menjadi salah satu program Pendidikan Nasional. Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia Departemen Pendidikan menetapkan empat kebijaksanaan pokok dalam bidang pendidikan, yaitu pemerataan dan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan, dan efisiensi pendidikan.

Aspek pemerataan kesempatan yang ingin dicapai Departemen Pendidikan mengandung tiga hal, yaitu persamaan kesempatan 'ekualitas', aksesibilitas, dan keadilan atau kewajaran. *Ekualitas* berarti bahwa setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan. *Aksesibilitas* mengandung arti bahwa setiap orang, tanpa memandang asal-usulnya mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan pada semua jenis, jenjang, serta jalur pendidikan. Keadilan mengandung arti adanya "perbedaan" perlakuan menurut kondisi internal dan eksternal peserta didik. Adalah *adil* jika peserta didik diperlakukan menurut bakat, minat, dan kemampuannya. Aspek relevansi dapat dilihat sebagai keterkaitan antara pendidikan dan kebutuhan pembangunan. Mengingat keterbatasan sumber daya, perguruan tinggi harus dikelola secara efisien.

Dengan memperhatikan kebijaksanaan Departemen Pendidikan di atas, UT telah memberikan andil yang besar. UT telah memainkan peranan yang besar dalam meningkatkan kesempatan dan pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan tinggi. UT juga telah memberikan aksesibilitas yang tinggi bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikannya pada tingkat pendidikan tinggi, di manapun mereka berada. Jumlah mahasiswa yang pernah mencapai sekitar 400.000 orang telah memberikan andil yang besar bila dibandingkan dengan daya tampung seluruh perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Pengelolaan mahasiswa yang besar tersebut hanya dimungkinkan pada penyelenggaraan pendidikan dengan sistem jarak jauh (*Suara Terbuka* No. 7/Th. VII, Desember 1996).

Meskipun peluang untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh telah dibuka lebar, hingga saat ini terdapat beberapa lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Mereka banyak yang lebih memilih membuka kelas eksekutif atau

program-program ekstensi. Pembukaan program-program seperti itu lebih mudah bila dibandingkan dengan pembukaan program pendidikan jarak jauh. Pembukaan program pendidikan jarak jauh memerlukan infrastruktur yang tidak murah dan juga tidak mudah. Sebuah lembaga swasta yaitu Yayasan Indonesia Bangkit sejak tahun 2001 berusaha untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh dengan berafiliasi dengan Universitas Tun Abdurazak di Malaysia. Meskipun promosinya begitu gencar, usaha Yayasan Indonesia Bangkit untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh rupanya belum banyak mendapat sambutan dari masyarakat. Beberapa perguruan tinggi negeri di Kalimantan pada tahun 2001 juga pernah merancang pembangunan jaringan kemitraan untuk menyelenggarakan perkuliahan dengan sistem jarak jauh, tetapi kemudian tidak terdengar lagi perkembangan selanjutnya.

Kondisi-kondisi seperti pembukaan kelas eksekutif maupun kelas ekstensi, bahkan pendidikan sistem jarak jauh dari perguruan tinggi lain di samping akan merupakan ancaman bagi UT, juga merupakan peluang bagi UT untuk melakukan kompetisi secara sehat. Dengan adanya saingan, UT akan bekerja lebih keras untuk mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain. Untuk memiliki daya saing yang sehat, UT pun harus terus meningkatkan kemampuannya mengungguli perguruan tinggi lain. Visi UT untuk menjadi perguruan tinggi unggulan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan penyebaran informasi tentang pendidikan jarak jauh menunjukkan adanya komitmen UT terhadap mutu layanan. Sistem jaminan kualitas (Simintas) yang mulai diterapkan di UT sejak tahun 2003 dapat dilihat sebagai upaya UT untuk mewujudkan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.

Satu hal yang membanggakan pada dekade terakhir ini adalah gejala menguatnya kembali hubungan kemitraan antara UT dan perguruan tinggi negeri pembina UT. Banyak perguruan tinggi negeri yang

menata kembali hubungan kemitraannya dengan UT. Peran universitas pembina tidak lagi sebatas memberikan bantuan sumber daya manusia bagi UPBJJ UT di daerah, tetapi lebih dari itu, yaitu dalam bentuk pemberian tutorial kepada mahasiswa UT. Hubungan kerja sama lebih kuat pada beberapa perguruan tinggi negeri yang dijadikan mitra UT dalam pengembangan program S-2. Program ini dibuka dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh.

Program S-2 UT yang dibuka sejak tahun 2003 meliputi tiga program studi yaitu program studi manajemen, manajemen pendidikan, dan administrasi negara. Program ini dikembangkan dengan memanfaatkan jaringan kerja sama perguruan tinggi negeri. Dengan demikian, penerimaan mahasiswa S-2 UT tidak merata di semua daerah (UPBJJ), tetapi hanya di UPBJJ tertentu yang universitas pembinanya memiliki program studi yang sama dengan program studi S-2 yang diselenggarakan UT. Universitas pembina di daerah-daerah tersebut akan memperlengkapi dosen-dosen dan fasilitas lain yang dimilikinya, seperti ruang kuliah untuk mendukung penyelenggaraan program S-2 UT.

Peran UT di Masyarakat

Dalam memasuki usianya yang ke-20, UT telah memberikan warna tersendiri dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kelahiran UT telah mengubah pandangan masyarakat Indonesia dalam menyikapi pendidikan tinggi. Dengan adanya UT, masyarakat tidak lagi memiliki satu pandangan “menjadi mahasiswa dulu sampai lulus, kemudian bekerja” tetapi juga memiliki pandangan lain yang menjadi pilihan hidupnya, yaitu “bekerja dulu jika ada peluang, setelah itu mengambil kuliah sambil bekerja”.

Peran UT dalam pendidikan tinggi semakin penting dan strategis dengan besarnya jumlah mahasiswa yang dimiliki. Dari kurang lebih 950.000 jumlah mahasiswa perguruan tinggi negeri, 28 persen di antaranya adalah mahasiswa UT. Dari jumlah itu dapat dikatakan bahwa kelahiran UT telah meningkatkan daya tampung perguruan tinggi negeri secara signifikan. Setelah lulus mahasiswa UT bukan orang-orang yang memperebutkan pasar kerja, karena sebagian besar mereka sudah bekerja. Itu menunjukkan bahwa UT tidak menciptakan penganggur berpendidikan tinggi.

Dari paparan di atas, dapat dilihat peran strategis UT dalam dunia pendidikan tinggi. Peran tersebut antara lain dalam perluasan daya tampung perguruan tinggi, penyebaran berbagai hasil riset tentang pendidikan tinggi jarak jauh, penyediaan bahan ajar perguruan tinggi, peningkatan kualitas pegawai dari berbagai instansi, pengembangan berbagai model media pembelajaran, serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk kepentingan pendidikan.

Dengan jumlah mahasiswa yang besar, UT menempati posisi yang strategis dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Dalam hal perluasan daya tampung pada tingkat pendidikan tinggi, UT menempati posisi penting.

Saat ini UT merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dengan sistem terbuka dan jarak jauh modus tunggal. Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan jarak jauh, UT telah melakukan berbagai penelitian tentang pelaksanaan pendidikan tinggi jarak jauh. Hasil-hasil penelitian ini digunakan oleh UT sebagai bahan dalam pengembangan UT. Hasil penelitian tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas yang ingin mengetahui lebih mendalam tentang sistem pendidikan tinggi

terbuka dan jarak jauh, lebih khusus lagi tentang penyelenggaraan UT.

Produksi bahan ajar UT, yang jumlahnya telah mencapai lebih dari 1000 mata kuliah dan ditulis oleh pakar dari berbagai lembaga pendidikan di Indonesia, telah mengisi kekosongan penyediaan buku teks pada tingkat pendidikan tinggi. Bahan ajar UT telah banyak dimanfaatkan oleh dosen-dosen perguruan tinggi lain, baik negeri maupun swasta, sebagai bahan perkuliahan. Bahan ajar yang diproduksi UT bukan hanya bahan ajar tercetak saja, tetapi dilengkapi dengan dengan bahan noncetak dalam bentuk CD, VCD, bahan ajar berbantuan komputer, dan kaset audio. Di kemudian hari bahan ajar UT juga akan dapat diakses melalui Internet.

Sebagian besar mahasiswa UT adalah orang yang sudah bekerja, baik di pemerintah maupun swasta. Mereka adalah orang-orang yang ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung tugas mereka. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan itu akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan instansi tempat mereka bekerja. Dengan demikian, UT telah melakukan peran aktif dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Simpulan

Kelahiran UT merupakan suatu fenomena dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Dengan jumlah mahasiswanya yang besar, UT memiliki peran strategis dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Keberhasilan UT dalam perluasan jangkauan disebabkan sifatnya yang fleksibel dan aksesibel sebagai lembaga pendidikan jarak jauh. Fleksibilitas dan aksesibilitas merupakan keunggulan sistem belajar jarak jauh yang tidak dapat dicapai dalam lembaga

pendidikan yang konvensional. Perkembangan UT telah mewarnai dinamika dan konstalasi pendidikan tinggi di Indonesia.

Dengan memperhatikan empat program utama dari kebijakan Departemen Pendidikan Nasional yaitu pemerataan dan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan, dan efisiensi pendidikan, UT dapat dikatakan telah mengambil peran yang besar dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. □

Daftar Pustaka

- Almunawar, M. 1999. 'Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Terbuka (SLTP Terbuka): alternatif pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (Wajar Diknas)', Dalam Belawati, T. *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*. Jakarta: universitas Terbuka.
- Brotosiswoyo, S. 1996. *Catatan Akhir 4 tahun Masa Bakti Rektor Universitas Terbuka*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Habib, Z. 1999. 'SRP: embrio pendidikan terbuka di Indonesia'. Dalam Belawati, T. *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Suparman, A. dan Aminuddin Zuhairi, 2004. *Pendidikan Jarak Jauh: Teori dan Praktek*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka
- Suwondo, 2003. 'PPPG Tertulis Bandung'. Dalam Dedi Supriyadi, *Guru di Indonesia: Pendidikan, Pelatihan, dan Perjuangannya sejak Zaman Kolonial hingga Era Reformasi*. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan.
- Universitas Terbuka, 2000. *Evaluasi Diri Universitas Terbuka*. Jakarta: Universitas Terbuka (tidak diterbitkan).

Kompas, 25 September 2001

Suara Terbuka No. 7/Th. VII, Desember 1996.